



Jaga Warga Awasi Pendetang Saat Nataru

■ Dishub Pantau Kesehatan Pengendara di Perbatasan DIY

YOGYA, TRIBUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY meminta Satuan tugas (Satgas) Covid-19 level kalurahan mengaktifkan kelompok Jaga Warga. Hal itu sebagai antisipasi jika terdapat pendatang dari luar DIY yang masuk saat libur natal dan tahun baru (nataru).

Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, mengatakan, Jaga Warga diharapkan bukan hanya melakukan pengawasan ke tingkat kelurahan saja, melainkan hingga ke lingkungan RT/RW.

Langkah tersebut diperlukan sebagai upaya antisipasi agar tidak terjadi penularan Covid-19 di wilayah mereka.

"Yang perlu diawasi adalah terkait vaksinasi dua kali dan hasil tes antigen," katanya, Minggu (19/12).

Apabila mereka belum mendapat vaksin lengkap, pendatang tersebut akan diarahkan untuk mendapatkan vaksinasi di fasilitas layanan kesehatan terdekat. Selain itu, Satpol PP DIY juga tidak sungkan menindak lanjuti aduan masyarakat apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan (prokes).

"Kami juga akan menindaklanjuti pengaduan-pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran protokol kesehatan," papar dia.

Koordinator Bidang Penguatan Hukum Satgas Covid-19 itu juga akan memfokuskan pengawasan dan

ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS

- Satpol PP DIY meminta Satgas Covid-19 level kalurahan mengaktifkan kelompok Jaga Warga.
- Jaga Warga nantinya mengantisipasi pendatang dari luar DIY saat nataru.
- Satpol PP akan menerjunkan 598 personel gabungan.
- 270 personel bertugas mengecek kerumunan. 328 personel mengawasi proses di destinasi wisata.

pelayanan di perbatasan, pusat keramaian, tempat usaha serta destinasi wisata. Untuk perbatasan pengecekan syarat perjalanan akan dilakukan Dishub dan kepolisian.

Sebanyak 598 personel gabungan dari Satpol PP dan TNI Polri akan diterjunkan untuk pengawasan selama nataru. Sementara, sebanyak 270 personel ditugaskan untuk mengecek kerumunan yang terjadi di fasilitas umum, tempat usaha, seperti mal dan restoran.

"Pengawasan terkait penggunaan aplikasi peduli lindungi di setiap tempat usaha. Kemudian secara acak akan dicek vaksinasi baik masyarakat maupun wisatawan, serta kelengkapan tes antigen 1 kali 24 jam atau PCR 3 kali 24 jam," ungkapnya.

Sementara 328 personel lainnya bertugas mengawasi protokol kesehatan di destinasi wisata.

"Terdapat 33 titik destinasi wisata yang akan kami awasi khusus terkait proto-

kol kesehatan maupun terkait dengan vaksin dan antigen dari para pengunjung," jelasnya.

Pos pelayanan

Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) DIY tidak lagi memberlakukan aturan memutar arah kendaraan yang hendak masuk wilayah DIY. Para pelaku perjalanan hanya disyaratkan dalam kondisi sehat ketika ingin memasuki wilayah DIY.

Kepala Dishub DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan, *cek point* di perbatasan wilayah DIY-Jawa Tengah tetap dilakukan. Bedanya, pada 2020 lalu Kepolisian bersama Dishub mendirikan pos pantau di perbatasan. Sedangkan tahun ini, mereka tetap melakukan pengawasan dengan mendirikan pos pelayanan.

"Tidak ada putar balik kendaraan, tetapi yang ingin masuk ke Jogja harus sehat. Jadi *cek point* di perbatasan tetap ada, bedanya dulu pos pantau, tetapi sekarang

jadinya pos pelayanan," katanya, melalui sambungan telepon.

Made menambahkan, lokasi pos pelayanan itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya yakni di sejumlah pintu masuk wilayah DIY. "Di pos itu sifatnya hanya memastikan jika pelaku perjalanan dalam kondisi sehat," terang made.

Sementara ketentuan kendaraan yang hendak masuk ke destinasi wisata, selama masa natal 2021 dan tahun baru 2022 tetap akan diberlakukan skema ganjil genap kendaraan khusus di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul.

Dua kabupaten itu dinilai memiliki potensi membludaknya para wisatawan, oleh sebab itu pemangku kebijakan setempat memberlakukan ganjil genap pelat nomor kendaraan. "Karena dimungkinkan saat nataru banyak wisatawan yang menuju ke pantai. Jadi sementara ini hanya dua kabupaten itu yang berlakukan ganjil genap," jelasnya.

Sedangkan untuk di kabupaten/kota lain yang ada di wilayah DIY dijelaskan made hanya beberapa saja yang nantinya akan disesuaikan aturan serupa. "Seperti di Sleman itu di breksi juga, sementara ini hanya itu. Nanti tunggu koordinasi lagi dengan kepolisian," imbuhnya. (bda)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 10 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005